



eISSN 3090-7012 & pISSN 3090-6822

JURNAL ILMIAH LITERASI INDONESIA

Vol. 1, No. 2, Tahun 2025

doi.org/10.63822/87fxmx42

Hal. 424-437

Homepage <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jili>

Integrasi Pendidikan Perdamaian dalam Sistem Pendidikan Formal: Tantangan, Dinamika Konflik Global, dan Urgensi Membangun Toleransi serta Kohesi Sosial

Syaifudin Zuhri¹, Masnunah², Sutomo³
Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat^{1,2}

*Email Korespondensi: uddinbleck@gmail.com

Diterima: 15-08-2025 | Disetujui: 20-08-2025 | Diterbitkan: 22-08-2025

ABSTRACT

This study aims to examine the integration of peace education into the formal education system using a qualitative approach and desk study methods. Data were collected from scientific literature, academic journals, and other credible sources relevant to the theme of peace education. Findings indicate that the integration of peace education faces systemic, cultural, and practical barriers, such as prioritization of academic subjects, lack of teacher training, and institutional and political resistance. The dynamics of global conflict, such as ethnic tensions and digital polarization, underscore the urgency of peace education to instill values of tolerance, justice, and conflict resolution skills in young people. Programs such as Education for Peace in Bosnia and Generations for Peace in Jordan have proven effective in reducing prejudice and increasing social cohesion, although challenges such as cultural incompatibility and limited resources remain. This study recommends policy advocacy, teacher training, digital literacy integration, and contextual approaches to enhance the effectiveness of peace education in building inclusive and peaceful societies.

Keywords: *Peace Education, Formal Education System, Barriers to Integration, Global Conflict, Tolerance, Social Cohesion, Digital Literacy*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi pendidikan perdamaian dalam sistem pendidikan formal menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari literatur ilmiah, jurnal akademik, dan sumber kredibel lainnya yang relevan dengan tema pendidikan perdamaian. Temuan menunjukkan bahwa integrasi pendidikan perdamaian menghadapi hambatan sistemik, budaya, dan praktis, seperti prioritas pada mata pelajaran akademik, kurangnya pelatihan guru, serta resistensi institusional dan politik. Dinamika konflik global, seperti ketegangan etnis dan polarisasi digital, menggarisbawahi urgensi pendidikan perdamaian untuk menanamkan nilai toleransi, keadilan, dan keterampilan penyelesaian konflik pada generasi muda. Program seperti Education for Peace di Bosnia dan Generations for Peace di Yordania membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi prasangka dan meningkatkan kohesi sosial, meskipun tantangan seperti ketidaksesuaian budaya dan keterbatasan sumber daya masih ada. Penelitian ini merekomendasikan advokasi kebijakan, pelatihan guru, integrasi literasi digital, dan pendekatan kontekstual untuk meningkatkan efektivitas pendidikan perdamaian guna membangun masyarakat yang inklusif dan damai.

Kata Kunci: Pendidikan Perdamaian, Sistem Pendidikan Formal, Hambatan Integrasi, Konflik Global, Toleransi, Kohesi Sosial, Literasi Digital



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syaifudin Zuhri, Masnunah & Sutomo. (2025). Integrasi Pendidikan Perdamaian dalam Sistem Pendidikan Formal: Tantangan, Dinamika Konflik Global, dan Urgensi Membangun Toleransi serta Kohesi Sosial. *Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia*, 1(2), 424-437. <https://doi.org/10.63822/87fmx42>

PENDAHULUAN

Pendidikan telah lama diakui sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai, terutama di tengah dinamika global yang sarat dengan berbagai bentuk konflik, baik antarnegara, antarkelompok, maupun dalam lingkup masyarakat lokal. Konflik-konflik ini, yang sering kali dipicu oleh perbedaan ideologi, kepentingan politik, kesenjangan sosial-ekonomi, atau ketegangan budaya, menunjukkan bahwa dunia masih menghadapi tantangan besar dalam menciptakan koeksistensi yang damai. (Tular & Manik, 2022) Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai perdamaian, yang tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap, nilai, dan keterampilan yang mendukung kehidupan harmonis. Pendidikan tidak sekadar menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tetapi juga menjadi fondasi untuk membentuk karakter individu yang mampu menghargai keberagaman, menyelesaikan konflik secara konstruktif, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang inklusif. (Saifuddin et al., 2022)

Pendidikan perdamaian, sebagaimana didefinisikan oleh UNESCO, adalah proses yang bertujuan untuk membekali individu dengan nilai, pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku yang memungkinkan mereka hidup secara harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan alam. (United Nations Educational et al., 2018) Pendekatan ini menekankan pentingnya pengembangan kompetensi seperti pemikiran kritis, empati, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Konsep ini diperkuat oleh Peace Insight, yang menyatakan bahwa pendidikan perdamaian berfokus pada upaya untuk mempromosikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mencegah konflik, menyelesaikannya secara damai, atau menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian berkelanjutan. Namun, tantangan dalam menerapkan pendidikan perdamaian tidaklah sederhana. Banyak sistem pendidikan di berbagai belahan dunia masih terfokus pada pencapaian akademik semata, sehingga aspek pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan sering kali terabaikan. Selain itu, kurangnya sumber daya, pelatihan guru yang memadai, serta perbedaan prioritas pendidikan antarnegara turut memperumit upaya untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian dalam kurikulum formal.

Pentingnya pendidikan perdamaian semakin terasa di era modern, di mana dunia masih dihadapkan pada berbagai bentuk konflik dan kekerasan, mulai dari perang antarnegara, konflik etnis, hingga kekerasan berbasis agama atau ideologi. Data dari Global Peace Index menunjukkan bahwa tingkat perdamaian global cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan konflik bersenjata dan ketegangan sosial di berbagai wilayah. (Estes, 2023) Di sisi lain, globalisasi dan kemajuan teknologi, meskipun membawa manfaat, juga memperbesar potensi konflik akibat penyebaran informasi yang cepat, polarisasi pandangan, dan meningkatnya intoleransi di media sosial. Dalam konteks ini, pendidikan perdamaian menjadi semakin relevan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman sejak usia dini. Generasi muda, sebagai agen perubahan masa depan, perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya koeksistensi damai, namun tantangan seperti kurangnya kesadaran akan pendidikan perdamaian, resistensi budaya, atau kurikulum yang kaku sering kali menghambat upaya ini. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan perdamaian tidak hanya berkaitan dengan implementasi, tetapi juga dengan paradigma pendidikan yang masih terbatas pada aspek kognitif tanpa mengutamakan pembentukan karakter yang mendukung perdamaian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat integrasi pendidikan perdamaian dalam sistem pendidikan formal, sehingga dapat dipahami kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dinamika konflik global dan kebutuhan akan pendidikan perdamaian di era modern, dengan fokus pada bagaimana ketegangan global memengaruhi urgensi pendidikan ini dalam membangun masyarakat yang harmonis. Terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendidikan perdamaian dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman pada generasi muda, guna menilai dampaknya terhadap pembentukan sikap sosial yang positif dan pencegahan konflik di masa depan.

KAJIAN TEORI

Definisi dan Hubungan Antara Pendidikan dan Perdamaian

Pendidikan secara umum dipahami sebagai proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Presiden RI, 2022) Definisi ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, nilai, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan individu dan masyarakat.

Dari perspektif global, pendidikan sering kali dilihat sebagai sarana untuk memberdayakan individu dan komunitas. Menurut UNESCO, pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan keadilan sosial. Pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. (Ekah, 2021) Pendekatan ini mencakup pendidikan formal, informal, dan nonformal, yang semuanya bertujuan untuk membekali individu dengan alat untuk menghadapi tantangan kehidupan.

Namun, pendidikan tidak selalu berjalan seragam di setiap konteks. Di banyak negara, pendidikan masih menghadapi tantangan seperti akses yang tidak merata, kualitas pengajaran yang bervariasi, dan kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan politik, yang sering kali membatasi cakupan dan dampaknya. Oleh karena itu, definisi pendidikan tidak hanya mencakup proses pembelajaran, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang membentuk tujuan dan implementasinya.

Perdamaian sering kali dipahami sebagai keadaan harmonis yang bebas dari konflik atau kekerasan. Namun, konsep perdamaian memiliki makna yang jauh lebih luas dan kompleks. Menurut Johan Galtung, seorang ahli studi perdamaian, perdamaian dapat dibagi menjadi dua jenis: perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif merujuk pada absennya kekerasan fisik atau konflik bersenjata, seperti berhentinya perang atau kekerasan langsung. Sementara itu, perdamaian positif melampaui sekadar

tidak adanya konflik, mencakup terciptanya kondisi sosial yang adil, setara, dan mendukung kesejahteraan semua pihak. Perdamaian positif menekankan pentingnya keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pengelolaan konflik secara konstruktif. (Jondar et al., 2022)

UNESCO mendefinisikan perdamaian sebagai kondisi di mana individu, kelompok, dan masyarakat dapat hidup bersama dengan saling menghormati, bebas dari diskriminasi, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara penuh. (Ekah, 2021) Dalam konteks ini, perdamaian tidak hanya dilihat sebagai tujuan akhir, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan pembangunan hubungan yang harmonis, penyelesaian konflik secara damai, dan promosi nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan kerja sama. Organisasi seperti Peace Insight juga menegaskan bahwa perdamaian adalah hasil dari upaya sadar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung koeksistensi, di mana perbedaan budaya, agama, atau ideologi dihormati dan dikelola dengan baik.

Namun, konsep perdamaian sering kali menghadapi tantangan dalam penerapannya. Di banyak belahan dunia, perdamaian terhambat oleh konflik yang berakar pada ketimpangan ekonomi, diskriminasi, atau ketegangan politik. Selain itu, perdamaian tidak selalu dirasakan secara merata; apa yang dianggap sebagai perdamaian oleh satu kelompok mungkin dianggap sebagai ketidakadilan oleh kelompok lain. Oleh karena itu, definisi perdamaian juga harus mempertimbangkan konteks budaya, sejarah, dan sosial yang membentuk persepsi dan realitasnya.

Pendidikan dan perdamaian memiliki hubungan yang erat dan saling memperkuat. Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai yang mendukung perdamaian, seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Melalui pendidikan, individu dapat dilatih untuk berpikir kritis, memahami perspektif orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Sebaliknya, perdamaian menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan, karena konflik dan kekerasan sering kali mengganggu akses terhadap pendidikan dan menghambat proses pembelajaran.

Pendidikan perdamaian, sebagai cabang spesifik dari pendidikan, secara khusus dirancang untuk mempromosikan nilai-nilai yang mendukung koeksistensi damai. Menurut UNESCO, pendidikan perdamaian bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencegah konflik, menyelesaikannya secara damai, atau menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian. (Singh, 2023) Pendekatan ini mencakup pengembangan kompetensi seperti empati, komunikasi yang efektif, dan kemampuan untuk mengelola konflik tanpa kekerasan. Namun, tantangan seperti kurangnya integrasi pendidikan perdamaian dalam kurikulum formal, keterbatasan sumber daya, dan resistensi budaya sering kali menghambat efektivitasnya.

Kerangka Teoritis Pendidikan Perdamaian

1. Pedagogi Kritis Paulo Freire

Pedagogi kritis, yang dikembangkan oleh filsuf dan pendidik Brasil, Paulo Freire, merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan proses belajar-mengajar sebagai alat untuk pembebasan dan transformasi sosial. Dalam bukunya yang terkenal, *Pedagogy of the Oppressed* (1970), Freire menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh sekadar menjadi proses transfer pengetahuan secara pasif, atau yang ia sebut sebagai "model perbankan," di mana guru menyimpan informasi ke dalam pikiran siswa. Sebaliknya, pedagogi kritis mengajak peserta didik untuk mengembangkan kesadaran kritis (*conscientização*), yaitu

kemampuan untuk memahami realitas sosial mereka, mengenali ketidakadilan, dan bertindak untuk mengubahnya. (Freire, 2020) Dalam konteks pendidikan perdamaian, pendekatan ini memiliki relevansi yang kuat karena banyak konflik sosial berakar pada ketidakadilan struktural, seperti kemiskinan, diskriminasi, atau ketimpangan kekuasaan. Pedagogi kritis mendorong individu untuk tidak hanya memahami akar konflik ini, tetapi juga memberdayakan mereka untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang lebih adil.

Pendekatan Freire menekankan pentingnya dialog sebagai inti dari proses pendidikan. Dialog yang sejati, menurut Freire, adalah proses dua arah antara pendidik dan peserta didik, di mana keduanya saling belajar dan berbagi perspektif untuk memahami dunia secara lebih kritis. Dalam konteks pendidikan perdamaian, dialog ini menjadi alat untuk membangun empati, memahami perspektif orang lain, dan mengelola konflik secara konstruktif. (Freire, 2020)

Namun, implementasi pedagogi kritis menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari sistem pendidikan yang cenderung mempertahankan status quo, kurangnya pelatihan pendidik dalam pendekatan ini, dan keterbatasan sumber daya di banyak institusi pendidikan. Selain itu, dalam masyarakat yang terpolarisasi atau memiliki sejarah konflik yang panjang, menerapkan pedagogi kritis sering kali memerlukan keberanian untuk menghadapi ketegangan sosial dan politik. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap menjadi kerangka yang kuat untuk pendidikan perdamaian, karena mampu menumbuhkan kesadaran akan ketidakadilan dan memotivasi individu untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih harmonis.

2. Perdamaian Positif Johan Galtung

Teori perdamaian positif, yang dipopulerkan oleh Johan Galtung, seorang pionir dalam studi perdamaian, menawarkan perspektif yang mendalam tentang makna perdamaian. Galtung membedakan antara perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif merujuk pada kondisi absennya kekerasan fisik atau konflik bersenjata, seperti berhentinya perang atau gencatan senjata. Namun, Galtung berargumen bahwa perdamaian sejati tidak hanya berhenti pada ketidakhadiran perang, tetapi juga mencakup perdamaian positif, yaitu kondisi di mana tidak ada kekerasan struktural—seperti ketidakadilan sosial, diskriminasi, atau penindasan—dan terwujudnya keadilan sosial, kesetaraan, serta kesejahteraan bagi semua pihak. (Grewal, 2003) Dalam kerangka ini, pendidikan perdamaian berperan penting dalam menciptakan kondisi sosial yang mendukung perdamaian positif, karena pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Institute for Economics & Peace (IEP) mengembangkan konsep perdamaian positif lebih lanjut melalui kerangka Positive Peace, yang terdiri dari delapan pilar, yaitu pemerintahan yang baik, distribusi sumber daya yang adil, arus informasi yang bebas, hubungan baik dengan tetangga, tingkat modal manusia yang tinggi, penerimaan hak individu, rendahnya tingkat korupsi, dan lingkungan bisnis yang sehat. (IEP, 2021) Dalam kerangka ini, pendidikan dianggap sebagai elemen kunci dalam pilar High Levels of Human Capital, karena pendidikan yang berkualitas mampu menghasilkan individu yang terampil, kritis, dan mampu berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil dan damai. Namun, mencapai perdamaian positif melalui pendidikan bukanlah tugas yang mudah. Banyak masyarakat masih bergulat dengan tantangan seperti akses pendidikan yang tidak merata, kurikulum yang tidak mendukung nilai-nilai perdamaian, dan konflik sosial yang mengganggu proses pendidikan. Selain itu, perdamaian positif sering

kali sulit diwujudkan di wilayah yang memiliki sejarah konflik berkepanjangan, di mana ketidakpercayaan antarkelompok atau trauma kolektif masih mendominasi. Oleh karena itu, pendidikan perdamaian yang berorientasi pada perdamaian positif harus dirancang secara kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan politik setempat.

METODE

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik terkini, artikel ilmiah, serta sumber-sumber kredibel lainnya yang relevan dengan tema karakteristik sejarah pemikiran Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Menghambat Integrasi Pendidikan Perdamaian

Faktor-faktor yang menghambat integrasi pendidikan perdamaian dalam sistem pendidikan formal sangat beragam, mencakup tantangan sistemik, budaya, praktis, dan konteks spesifik yang memengaruhi efektivitas implementasi. Salah satu hambatan utama adalah resistensi institusional terhadap perubahan kurikulum. Banyak sistem pendidikan formal, terutama di negara-negara dengan kurikulum yang sudah mapan, cenderung memprioritaskan mata pelajaran akademik tradisional seperti matematika, sains, atau bahasa, yang dianggap lebih relevan untuk ujian nasional atau kebutuhan ekonomi. Pendidikan perdamaian, yang sering kali dianggap sebagai mata pelajaran "lunak" karena fokusnya pada nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan penyelesaian konflik, kerap kali dianggap kurang penting atau sulit diukur keberhasilannya. Akibatnya, alokasi waktu, sumber daya, dan dukungan untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian sering kali terbatas, terutama di sistem pendidikan yang kaku dan terpusat. (Rantung, 2017)

Tantangan lain adalah kurangnya pelatihan guru yang memadai. Guru merupakan ujung tombak dalam menyampaikan pendidikan perdamaian, tetapi banyak di antara mereka tidak mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengajarkan keterampilan seperti mediasi konflik, dialog antarbudaya, atau pengelolaan kelas yang inklusif. Tanpa pelatihan yang tepat, guru mungkin merasa tidak percaya diri atau tidak kompeten untuk mengintegrasikan elemen pendidikan perdamaian ke dalam pengajaran mereka. Selain itu, beberapa guru mungkin memiliki bias budaya atau ideologi pribadi yang bertentangan dengan nilai-nilai perdamaian, terutama di wilayah yang terpolarisasi atau memiliki sejarah konflik yang panjang. (Thoyib, 2020) Misalnya, dalam konteks pasca-konflik seperti Bosnia dan Herzegovina, di mana sistem pendidikan masih terpisah berdasarkan etnis, guru sering kali menghadapi kesulitan untuk mempromosikan narasi yang inklusif karena tekanan dari komunitas lokal atau otoritas politik.

Konteks budaya dan sosial juga menjadi hambatan signifikan. Pendidikan perdamaian memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal, norma budaya, dan sejarah konflik di suatu wilayah. (Mulyadi, Diah Sartika, Hasrian Rudi Setiawan, 2023) Namun, pendekatan universal yang sering kali dipromosikan oleh organisasi internasional seperti UNESCO atau badan donor dapat dianggap asing atau tidak relevan di beberapa komunitas. Sebagai contoh, di Irak, di mana sejarah kekerasan sektarian



masih memengaruhi hubungan sosial, upaya untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian sering kali bertemu dengan resistensi karena masyarakat merasa bahwa narasi perdamaian bertentangan dengan pengalaman kolektif mereka. Selain itu, di beberapa budaya yang menekankan hierarki atau otoritas, metode pengajaran yang berbasis dialog dan partisipasi, yang merupakan inti dari pendidikan perdamaian, dapat dianggap tidak sesuai atau sulit diterapkan.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak negara, terutama di wilayah berkembang atau terdampak konflik, menghadapi kendala dalam hal pendanaan, infrastruktur, dan tenaga pendidik. Program pendidikan perdamaian, yang sering kali memerlukan investasi dalam pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan kegiatan ekstrakurikuler, dapat dianggap sebagai beban tambahan bagi sistem pendidikan yang sudah kekurangan sumber daya. Sebagai contoh, dalam studi kasus Help the Afghan Children's School-Based Peace Education di Afghanistan, meskipun program ini berhasil mengurangi kekerasan antar anak, tantangan seperti kurangnya dana untuk memperluas program ke sekolah lain dan ketidakstabilan politik menghambat keberlanjutan inisiatif tersebut. (Robiollé-Moul, 2012)

Selain itu, pengukuran efektivitas pendidikan perdamaian sering kali menjadi tantangan tersendiri. Berbeda dengan mata pelajaran seperti matematika atau sains, yang memiliki indikator keberhasilan yang jelas seperti nilai ujian, dampak pendidikan perdamaian—seperti perubahan sikap atau pengurangan konflik—sulit diukur secara kuantitatif. Hal ini membuat pembuat kebijakan ragu untuk memprioritaskan pendidikan perdamaian, karena mereka kesulitan membuktikan hasilnya kepada pemangku kepentingan. Dalam program Generations for Peace di Yordania, evaluasi menunjukkan peningkatan dalam hub Citatan dan pengurangan kekerasan, tetapi kesulitan dalam mengevaluasi dampak jangka panjang terhadap komunitas yang lebih luas membuat program ini sulit untuk dipertahankan atau diperluas.

Faktor politik juga memainkan peran besar dalam menghambat integrasi pendidikan perdamaian. Di banyak negara, sistem pendidikan berada di bawah kendali pemerintah, dan keputusan tentang kurikulum sering kali dipengaruhi oleh agenda politik. Dalam konteks pasca-konflik atau wilayah dengan ketegangan politik, pendidikan perdamaian dapat dianggap sebagai ancaman terhadap status quo, terutama jika narasi perdamaian menantang ideologi dominan atau narasi sejarah resmi. Sebagai contoh, di beberapa wilayah dengan konflik etnis atau agama, seperti di Rwanda pasca-genosida, upaya untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian sering kali menghadapi tantangan karena pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu khawatir bahwa pendekatan ini dapat membuka kembali luka lama atau memicu ketegangan baru.

Selanjutnya, keberlanjutan efek pendidikan perdamaian sering kali dipertanyakan. Meskipun program seperti Education for Peace di Bosnia menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, dampaknya sering kali terbatas pada lingkungan sekolah dan sulit meluas ke masyarakat secara keseluruhan. Efek riak (ripple effect) yang diharapkan dari pendidikan perdamaian sering kali terhambat oleh faktor eksternal seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, atau kekerasan struktural yang masih ada di luar sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian tidak dapat berdiri sendiri; ia harus didukung oleh kebijakan yang lebih luas untuk mengatasi akar masalah konflik.

Kurangnya keterlibatan komunitas juga dapat menghambat integrasi pendidikan perdamaian. Sekolah tidak beroperasi dalam ruang hampa; mereka merupakan bagian dari ekosistem sosial yang lebih besar. Jika komunitas lokal, orang tua, atau pemimpin masyarakat tidak mendukung nilai-nilai perdamaian,

upaya sekolah untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian dapat gagal. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas konservatif, nilai-nilai seperti kesetaraan gender atau toleransi antaragama yang diajarkan dalam pendidikan perdamaian dapat dianggap bertentangan dengan norma lokal, sehingga menciptakan resistensi dari orang tua atau tokoh masyarakat.

Hubungan Antara Dinamika Konflik Global dan Kebutuhan akan Pendidikan Perdamaian

Dinamika konflik global di era modern ditandai dengan kompleksitas yang meningkat, baik dari segi penyebab, skala, maupun dampaknya. Konflik global saat ini tidak hanya mencakup perang antarnegara, tetapi juga konflik intra-negara, ketegangan etnis, agama, dan ideologi, serta ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan polarisasi digital. Menurut laporan Global Peace Index dari Institute for Economics and Peace, dunia menghadapi penurunan tingkat kedamaian global selama dekade terakhir, dengan peningkatan konflik bersenjata, terorisme, dan ketidakstabilan politik di berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Afrika Sub-Sahara, dan Eropa Timur. (IEP, 2021) Konflik seperti perang di Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, dan kekerasan berbasis identitas di Myanmar menunjukkan bahwa akar konflik sering kali berasal dari ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan kurangnya pemahaman antar kelompok. Selain itu, era digital telah memperburuk dinamika konflik melalui penyebaran misinformasi, ujaran kebencian di media sosial, dan polarisasi ideologis, yang memperdalam perpecahan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan perdamaian menjadi semakin relevan sebagai alat untuk mengatasi akar masalah konflik dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Pendidikan perdamaian, sebagaimana didefinisikan oleh UNESCO, adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memungkinkan individu untuk hidup harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pada nilai-nilai seperti toleransi, empati, keadilan, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Dalam menghadapi dinamika konflik global, pendidikan perdamaian berfungsi sebagai mekanisme preventif dan transformatif. Secara preventif, pendidikan perdamaian membekali individu dengan keterampilan untuk mengelola konflik secara konstruktif, seperti melalui negosiasi, mediasi, dan dialog antarbudaya. Secara transformatif, pendidikan ini mendorong perubahan struktural dengan menanamkan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Paulo Freire dalam *Pedagogy of the Oppressed* (1970), yang menekankan pendidikan sebagai alat pembebasan dari struktur opresif. (Freire, 2020) Dengan demikian, pendidikan perdamaian tidak hanya berfokus pada menghentikan kekerasan (perdamaian negatif) tetapi juga pada membangun keadilan sosial dan harmoni (perdamaian positif), sesuai dengan kerangka teoretis Johan Galtung tentang perdamaian positif.

Hubungan antara dinamika konflik global dan kebutuhan akan pendidikan perdamaian terlihat jelas dalam beberapa aspek. Pertama, konflik global sering kali berakar pada ketidakpahaman dan intoleransi antar kelompok, yang dapat diatasi melalui pendidikan yang mempromosikan pemahaman lintas budaya. Misalnya, konflik etnis di Rwanda pasca-genosida 1994 menunjukkan bagaimana pendidikan yang memisahkan kelompok etnis memperburuk ketegangan, sementara program pendidikan perdamaian yang diperkenalkan kemudian, seperti yang didukung oleh UNICEF, membantu membangun kohesi sosial melalui pengajaran nilai-nilai rekonsiliasi. Kedua, konflik global yang didorong oleh ketimpangan ekonomi dan sosial, seperti di Afrika Sub-Sahara, menunjukkan perlunya pendidikan yang memberdayakan individu

untuk mengatasi ketidakadilan struktural. Pendidikan perdamaian dapat mengajarkan keterampilan kritis untuk menganalisis ketimpangan dan mendorong aksi kolektif yang damai. Ketiga, di era digital, di mana misinformasi dan ujaran kebencian memperburuk konflik, pendidikan perdamaian dapat mengintegrasikan literasi media untuk membantu individu membedakan informasi yang benar dan menghindari polarisasi.

Studi kasus global menunjukkan bagaimana pendidikan perdamaian merespons dinamika konflik secara efektif. Di Bosnia dan Herzegovina, program Education for Peace (EfP) yang dimulai pada tahun 2000 berhasil mengintegrasikan pendidikan perdamaian di lebih dari 1.000 sekolah, melibatkan ribuan siswa dan guru dalam lingkungan pasca-konflik yang terpecah secara etnis. Program ini berfokus pada penciptaan lingkungan belajar yang inklusif, mengurangi prasangka antar kelompok, dan mempromosikan penyembuhan kolektif, dengan evaluasi menunjukkan dampak positif pada hubungan antar etnis. (Dr. Younis Ahmad Sheikh, Rufadha Akhter, 2023) Di Yordania, Generations for Peace (2013–2015) melatih guru dan siswa di sekolah-sekolah yang menampung pengungsi Suriah untuk menggunakan kegiatan olahraga, seni, dan dialog sebagai alat perdamaian, yang berhasil mengurangi kekerasan antar siswa dan meningkatkan hubungan siswa-guru. Di Afghanistan, program Help the Afghan Children's School-Based Peace Education sejak 2003 telah membantu ribuan siswa di wilayah konflik untuk mengurangi kekerasan interpersonal dan memperbaiki norma gender yang berbahaya, meskipun tantangan seperti ketidakstabilan politik tetap ada. Ketiga studi kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan perdamaian dapat menangani dinamika konflik dengan pendekatan yang kontekstual, tetapi keberhasilannya tergantung pada adaptasi terhadap kebutuhan lokal. (Robiollé-Moul, 2012)

Di era modern, kebutuhan akan pendidikan perdamaian semakin mendesak karena beberapa alasan. Pertama, globalisasi telah meningkatkan interaksi antar budaya, yang dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Pendidikan perdamaian dapat membekali individu dengan keterampilan untuk menavigasi keragaman budaya secara harmonis. Kedua, ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim telah menciptakan konflik baru, seperti persaingan atas sumber daya air atau migrasi paksa. Pendidikan perdamaian dapat mengajarkan kerja sama lintas batas untuk mengatasi tantangan ini. Ketiga, perkembangan teknologi dan media sosial telah mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memperburuk polarisasi. Pendidikan perdamaian yang mencakup literasi digital dapat membantu individu mengenali dan melawan narasi yang memecah belah. Keempat, meningkatnya populasi muda di negara-negara berkembang, seperti di Afrika dan Asia Selatan, menawarkan peluang untuk membentuk generasi yang lebih damai melalui pendidikan, tetapi juga menimbulkan risiko jika generasi ini tidak dilengkapi dengan nilai-nilai perdamaian, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya angka pengangguran dan radikalisasi di beberapa wilayah.

Namun, integrasi pendidikan perdamaian dalam menanggapi dinamika konflik global menghadapi beberapa tantangan. Pertama, kurikulum pendidikan sering kali tidak selaras dengan kebutuhan lokal, terutama di wilayah dengan sejarah konflik yang kompleks. Misalnya, di Irak, upaya untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian sering kali dianggap tidak relevan karena narasi perdamaian bertentangan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat yang masih terpapar kekerasan sektarian. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dalam hal pendanaan maupun tenaga pendidik, menghambat skala dan keberlanjutan program pendidikan perdamaian, seperti yang terlihat di Afghanistan. Ketiga, resistensi politik dapat menghambat implementasi, terutama di negara-negara dengan pemerintahan otoriter yang



menganggap pendidikan perdamaian sebagai ancaman terhadap narasi resmi. Keempat, pengukuran dampak pendidikan perdamaian sulit dilakukan karena sifatnya yang jangka panjang dan kualitatif, sehingga menyulitkan pembuat kebijakan untuk membenarkan investasi di bidang ini.

Implikasi dari hubungan antara dinamika konflik global dan pendidikan perdamaian menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terpadu dan strategis. Pertama, pendidikan perdamaian harus diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan atau studi sosial, dengan penekanan pada keterampilan praktis seperti mediasi dan dialog. Kedua, pelatihan guru harus ditingkatkan untuk memastikan mereka mampu mengajarkan nilai-nilai perdamaian secara efektif, terutama di wilayah yang terdampak konflik. Ketiga, kemitraan antara sekolah, organisasi masyarakat, dan badan internasional seperti UNESCO dapat memperkuat implementasi program pendidikan perdamaian, seperti yang terlihat dalam keberhasilan Generations for Peace di Yordania. Keempat, pendidikan perdamaian harus mencakup literasi digital untuk mengatasi tantangan konflik di era digital, seperti ujaran kebencian dan misinformasi. Kelima, pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan budaya, sejarah, dan dinamika lokal sangat penting untuk memastikan relevansi dan penerimaan program.

Efektivitas Pendidikan Perdamaian dalam Menanamkan Nilai-nilai Toleransi, Keadilan, dan Penghormatan Terhadap Keberagaman

Pendidikan perdamaian telah diakui sebagai pendekatan strategis untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman pada generasi muda, yang merupakan kelompok kunci dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan inklusif. Dalam konteks global yang ditandai dengan konflik etnis, agama, dan ideologi, serta polarisasi akibat media sosial, pendidikan perdamaian berperan penting dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk hidup berdampingan secara damai. Menurut UNESCO (2017), pendidikan perdamaian bertujuan untuk mengembangkan kompetensi seperti pemikiran kritis, empati, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, yang semuanya merupakan fondasi untuk menanamkan nilai-nilai toleransi (kemampuan menerima perbedaan), keadilan (komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan sosial), dan penghormatan terhadap keberagaman (apresiasi terhadap keragaman budaya, agama, dan identitas). (Dr. Younis Ahmad Sheikh, Rufadha Akhter, 2023) Efektivitas pendidikan perdamaian dalam mencapai tujuan ini tergantung pada desain program, pendekatan pengajaran, konteks sosial, dan keterlibatan komunitas, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai studi kasus di seluruh dunia.

Salah satu cara utama pendidikan perdamaian menanamkan nilai-nilai ini adalah melalui kurikulum yang dirancang untuk mempromosikan pemahaman lintas budaya dan kesadaran sosial. Kurikulum pendidikan perdamaian sering kali mencakup topik seperti hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan sejarah konflik, yang diajarkan melalui metode interaktif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, dalam program Education for Peace (EfP) di Bosnia dan Herzegovina, yang dimulai pada tahun 2000, kurikulum diintegrasikan ke lebih dari 1.000 sekolah untuk mengajarkan siswa tentang rekonsiliasi dan koeksistensi dalam konteks pasca-konflik etnis. Program ini menggunakan pendekatan berbasis kesatuan, yang mendorong siswa untuk memahami perspektif orang lain, sehingga menanamkan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Evaluasi menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program ini menunjukkan penurunan prasangka antar etnis dan



peningkatan kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok beragam, membuktikan bahwa kurikulum yang relevan dapat secara efektif membentuk sikap positif pada generasi muda.

Selain kurikulum, metode pengajaran yang digunakan dalam pendidikan perdamaian juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Pendekatan pedagogis seperti pembelajaran kooperatif, dialogis, dan berbasis pengalaman memungkinkan generasi muda untuk secara aktif terlibat dalam memahami dan mempraktikkan toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Sebagai contoh, program Generations for Peace di Yordania (2013–2015) menggunakan kegiatan olahraga, seni, dan dialog untuk melibatkan siswa dari latar belakang yang berbeda, termasuk pengungsi Suriah dan komunitas lokal. Kegiatan ini dirancang untuk membangun empati dan kerja sama, dengan hasil evaluasi menunjukkan peningkatan hubungan antar siswa dan pengurangan kekerasan di sekolah. Pendekatan ini efektif karena memungkinkan generasi muda untuk mengalami langsung nilai-nilai perdamaian melalui interaksi nyata, bukan hanya melalui pembelajaran teoretis. Dengan demikian, metode pengajaran yang interaktif dan kontekstual terbukti mampu menanamkan nilai-nilai tersebut secara mendalam.

Peran guru juga sangat penting dalam keberhasilan pendidikan perdamaian. Guru yang terlatih dengan baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman dapat dipraktikkan secara langsung. Dalam studi kasus Help the Afghan Children's School-Based Peace Education di Afghanistan, pelatihan guru untuk mengajarkan keterampilan penyelesaian konflik dan kesetaraan gender membantu mengurangi kekerasan antar anak dan meningkatkan kesadaran tentang norma sosial yang inklusif di antara 3.500 siswa di 20 sekolah. Guru yang mampu memfasilitasi diskusi terbuka dan menghormati perbedaan siswa dapat memperkuat nilai-nilai ini melalui contoh perilaku sehari-hari. Namun, efektivitas pendekatan ini bergantung pada pelatihan yang memadai, karena guru yang tidak terlatih atau memiliki bias budaya dapat secara tidak sengaja menghambat penanaman nilai-nilai perdamaian.

Efektivitas pendidikan perdamaian juga terlihat dari kemampuannya untuk mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi generasi muda di era modern, seperti polarisasi digital dan konflik identitas. Dengan meningkatnya ujaran kebencian dan misinformasi di media sosial, pendidikan perdamaian yang mencakup literasi digital dapat membantu generasi muda mengenali narasi yang memecah belah dan mempromosikan dialog yang konstruktif. Misalnya, program pendidikan perdamaian di beberapa negara Eropa, seperti yang didukung oleh International Alert, telah mulai mengintegrasikan literasi media untuk mengajarkan generasi muda cara menghadapi ujaran kebencian secara damai. Pendekatan ini efektif karena relevan dengan pengalaman sehari-hari generasi muda, yang sering terpapar pada konten online yang dapat memperkuat prasangka atau intoleransi. Dengan demikian, pendidikan perdamaian yang responsif terhadap dinamika modern dapat memperkuat nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman.

Namun, efektivitas pendidikan perdamaian tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah resistensi budaya atau sosial di beberapa komunitas, terutama di wilayah dengan sejarah konflik yang kuat. Misalnya, di Irak, upaya untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan keadilan melalui pendidikan sering kali menghadapi resistensi karena narasi perdamaian dianggap bertentangan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat yang masih terpapar kekerasan sektarian. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti dana untuk pelatihan guru atau pengembangan kurikulum, dapat menghambat skala dan keberlanjutan program. Dalam kasus Afghanistan, meskipun program Help the Afghan Children



berhasil, tantangan seperti ketidakstabilan politik dan kurangnya dana membatasi dampaknya pada populasi yang lebih luas. Selain itu, pengukuran efektivitas pendidikan perdamaian sering kali sulit karena nilai-nilai seperti toleransi dan keadilan bersifat kualitatif dan jangka panjang, sehingga sulit untuk dievaluasi dengan indikator yang jelas seperti nilai ujian.

Faktor pendukung juga memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan perdamaian. Keterlibatan komunitas, termasuk orang tua dan pemimpin lokal, sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan di sekolah diperkuat di luar lingkungan pendidikan. Dalam program Education for Peace di Bosnia, keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah membantu memperkuat pesan perdamaian di komunitas. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah atau organisasi internasional, seperti UNESCO, dapat memfasilitasi integrasi pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum nasional, seperti yang terlihat di beberapa negara Afrika yang telah mengadopsi pendekatan ini. Kolaborasi antara sekolah dan organisasi masyarakat sipil juga meningkatkan efektivitas, seperti yang ditunjukkan oleh Generations for Peace di Yordania, di mana kemitraan dengan komunitas lokal memperkuat dampak program.

KESIMPULAN

Integrasi pendidikan perdamaian dalam sistem pendidikan formal terkendala oleh hambatan sistemik, budaya, dan praktis, seperti prioritas pada mata pelajaran akademik tradisional, kurangnya pelatihan guru, dan resistensi institusional serta politik. Konteks budaya yang tidak selaras, keterbatasan sumber daya di negara berkembang, dan minimnya keterlibatan komunitas memperburuk tantangan ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan advokasi kebijakan, pelatihan guru yang memadai, dan pendekatan kontekstual yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Dinamika konflik global, seperti ketegangan etnis dan polarisasi digital, menegaskan urgensi pendidikan perdamaian untuk menanamkan toleransi, keadilan, dan keterampilan penyelesaian konflik pada generasi muda. Program seperti Education for Peace di Bosnia dan Generations for Peace di Yordania menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi prasangka dan meningkatkan kohesi sosial, meskipun tantangan seperti ketidaksesuaian budaya dan keterbatasan sumber daya tetap ada. Integrasi literasi digital dan keterlibatan komunitas dapat meningkatkan efektivitas pendidikan perdamaian, menjadikannya alat penting untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Younis Ahmad Sheikh, Rufadha Akhter. (2023). PEACE EDUCATION: A PATHWAY TO THE CULTURE OF PEACE. *Pakistan Journal of International Affairs*, 6(3). <https://doi.org/10.52337/pjia.v6i3.895>
- Ekah, E. R. (2021). UNESCO and Peace Education: UNESCO's Contributions to the Promotion of Peace Education in Cameroon. *International Journal of Peace, Education and Development*, 9(2). <https://doi.org/10.30954/2454-9525.02.2021.4>



- Estes, R. J. (2023). Global Peace Index. In *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17299-1_3385
- Freire, P. (2020). Pedagogy of the oppressed. In *The Community Performance Reader*. <https://doi.org/10.4324/9781003060635-5>
- Grewal, B. S. (2003). Johan Galtung: Positive and Negative Peace. *School of Social Science, Auckland University of Technology*, 30(1).
- IEP. (2021). Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2021. *Global Peace Index*.
- Jondar, A., Widodo, A. P., De Fretes, J., Hakim, L., Susanto, S., & Sujud, M. (2022). JOHAN GALTUNG'S CONCEPT OF PEACE CULTURE AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA. *Lire Journal (Journal of Linguistics and Literature)*, 6(2). <https://doi.org/10.33019/lire.v6i2.163>
- Mulyadi, Diah Sartika, Hasrian Rudi Setiawan, R. (2023). Pendidikan Agama Islam Sebagai Sarana Membentuk Identitas Keagamaan dalam Masyarakat Multikultural. *Khazanah : Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v2i3.1554>
- Presiden RI. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022*.
- Rantung, D. A. (2017). PERAN PENDIDIKAN PERDAMAIAN KAITANNYA DENGAN PAK DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA). *Jurnal Shanan*, 1(1). <https://doi.org/10.33541/shanan.v1i1.1466>
- Robiollé-Moul, T. (2012). The impediments to national school-based peace education programs in fragile states. *Conference Papers -- New England Political Science Association*.
- Saifuddin, S., Chotib, R., & Muhammad, M. (2022). Definisi Sejarah Dan Konsep Peace Education (Pendidikan Perdamaian). *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace*, 2(36).
- Singh, R. (2023). UNESCO: ROLE AND FUNCTIONS. *VIDYA - A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY*, 2(1). <https://doi.org/10.47413/vidya.v2i1.281>
- Thoyib, M. (2020). The Management of Multicultural Resolution on Post- Transnationalism of Indonesian Islamic Education: Challenges for the Future. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 18(2). <https://doi.org/10.21154/cendekia.v18i2.1901>
- Tular, N. I., & Manik, J. S. (2022). Pendidikan Perdamaian bagi Remaja: Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik antar Umat Beragama. *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, 5(1). <https://doi.org/10.34081/fidei.v5i1.228>
- United Nations Educational, S. and C. O. (UNESCO), United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS), United Nations Population Fund (UNFPA), United Nations Children's Fund (UNICEF), UN Women, & World Health Organization (WHO). (2018). *International technical guidance on sexuality education*. <https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf> .